

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan kependudukan yang cukup kompleks. Meskipun pemerintah bersama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) telah mencanangkan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) sejak tahun 1971 hingga saat ini agaknya belum cukup maksimal dalam meminimalisir segala problematika kependudukan yang ada. Program KKBPK yang diharapkan dapat berjaya justru diterpa pasang surut dalam pelaksanaannya. Bahkan semakin bergantinya era, program ini cenderung kurang mendapatkan respon dan semakin tidak terdengar eksistensinya. Apalagi pada tahun 2019 terlihat angka penurunan yang memprihatinkan. Berdasarkan data Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP), dari kelima sasaran strategis Program KKBPK tahun 2019 hanya ada satu sasaran yang memenuhi target, yakni penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang mencapai 24,6 persen dari target 23,5 persen. Sedangkan keempat sasaran lainnya memiliki pencapaian yang masih jauh dari target awal (Tabel 1).

**Tabel 1 . Sasaran dan Pencapaian Program KKBPK tahun 2019**

No.	Sasaran	Target	Pencapaian
1.	Angka Kelahiran Total ( Total Fertility Rate/TFR)	2,28%	2,45%
2.	Penggunaan kontrasepsi Modern	61,1%	54,97%
<b>3.</b>	<b>Tingkat putus pemakaian kontrasepsi (Drop out)</b>	<b>25%</b>	<b>29%</b>
4.	<i>Unmet Need</i> (PUS yang semestinya KB namun tidak terlayani)	12,1 %	12,1%

Sumber : Reviu KKBPK Tahun 2019, 2019

Melemahnya Program KKBPK dan tidak tercapainya sasaran dan pencapaian program seperti pada tabel 1. menunjukkan bahwa belum terbinanya kelangsungan ber-KB. Hal itu dikuatkan oleh faktor-faktor yang tercantum dalam Buku Pedoman Kampung KB,(2017) yang dapat dilihat pada kondisi sebagai berikut :

1. Peranan PPKBD, Sub PPKBD, dan Paguyuban KB yang tidak ditekankan pada pembinaan peserta KB tetapi diarahkan untuk mencari peserta baru dalam hal lain seperti pendataan.
2. Pemantau kelangsungan ber-KB (Sub PPKBD) pada umumnya sudah tidak digunakan lagi secara nasional, hanya beberapa daerah yang masih menggunakan.

3. Pemenuhan kontrasepsi hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin, sisanya dilaksanakan oleh pihak swasta (Dokter, Bidan Swasta, dan Apotek) yang pemantauannya kurang tersistem .
4. Kegiatan KB di kampung, desa maupun kecamatan yang awalnya gencar menjadi sepi sehingga perhatian masyarakat terhadap program KB kurang, pemangku kepentingan cenderung acuh dan kurang peduli.
5. Koordinasi dan hubungan emosional antara petugas KB dengan aparat desa terutama ketua RW dan RT maupun tokoh masyarakat yang awalnya akrab namun sekarang merenggang. Petugas KB cenderung melakukan pendekatan dan kerjasama dengan PPKBD, Sub PPKBD saja. (Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB, 2017).

Kondisi tersebut mendorong pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan revitalisasi dan rebranding program (Siaran Pers No. RILIS/095/B4/BKKBN/IX/2019). Akhirnya Pemerintah mencanangkan program kampung KB sebagai upaya untuk membumikan program KB dan turut mensukseskan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan) untuk dimensi pembangunan manusia pada pembangunan bidang kesehatan dan mental/karakter (Revolusi Mental).

Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017), Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan

prioritas Program KKBPB secara utuh di lini lapangan (Desa/Dukuh/RT) yang melibatkan seluruh Bidang di Lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementrian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah di seluruh Kabupaten / Kota.

Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang ikut serta dalam Program Kampung KB yang mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 2016. Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB, (2017), *stakeholders* diharapkan dapat memegang peranan penting dalam *menghandle* dan meminimalisir problematika kependudukan, khususnya di Kabupaten Boyolali berupa jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya yang tinggi (sebanyak 1,054,362 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,37 persen) serta tingginya tingkat kelahiran per seribu penduduk sebesar 12,2% (BPS Kabupaten Boyolali, 2020). Tujuan penyelenggaraan program Kampung KB lainnya adalah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan, kesehatan, perekonomian, pemukiman dan lingkungan serta tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

Kampung KB yang terbentuk di Kabupaten Boyolali hingga saat ini berjumlah 36 kampung KB (*Tabel 3*) yang setiap kecamatan ditunjuk masing-masing 2 (dua) buah kampung KB. Namun ada pengecualian terhadap 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Boyolali yang hanya ditunjuk 1 (satu) penyelenggara kampung KB per kecamatan. Pengecualian tersebut

dilakukan karena kedua kecamatan tersebut sudah dianggap cukup mapan dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakatnya sehingga kurang memenuhi kriteria pemilihan wilayah sebagai penyelenggara program kampung KB (Wawancara awal peneliti dengan Ketua Seksi Advokasi dan Penggerakan DP2KBP3A, Mei 2021). Sedangkan wilayah lain yang dianggap pemerataan perekonomian, pendidikan, dan kesejahteraannya kurang akan dipilih berdasarkan kriteria utama, kriteria wilayah, maupun kriteria khusus berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB, (2017). Ketiga kriteria tersebut dirinci pada tabel 2. sebagai berikut :

**Tabel 2. Kriteria Utama, Kriteria Wilayah dan Kriteria Khusus Lokasi Pemilihan Kampung KB**

<b>Kriteria Utama</b>	(1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (Miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada  (2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/ kelurahan dimana kampung KB tersebut berlokasi.
<b>Kriteria Wilayah</b>	1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran kereta api, (5) Kawasan miskin ( termasuk miskin perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan industri, (9) Kawasan wisata, (10) Padat penduduk.
<b>Kriteria Khusus</b>	(1) <b>Kriteria data</b> , dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga; (2) <b>Kriteria kependudukan</b> , dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah; (3) <b>Kriteria Program KB</b> , dimana peserta KB aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah daripada

	<p>capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat <i>unmet need</i> lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan; (4) <b>Kriteria program pembangunan keluarga</b> dimana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) <b>Kriteria program pembangunan sektor terkait</b> yang mencakup bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan dan program lainnya sesuai dengan perkembangan.</p>
--	--

Sumber : <https://kampungkb.bkkbn.go.id>, diolah oleh peneliti.

**Tabel 3. Data Kampung Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Boyolali Tahun 2020**

NO	NO REGISTER RDK	NAMA KAMPUNG KB	DESA	KECAMATAN
1	33090101	Sepekta Ber-KB	Selo	Selo
2	33090102	Lestari Mandiri Ngetren	Samiran	Selo
3	33090303	Elok	Jelok	Cepogo
4	33090304	Sejahtera	Kembangkuning	Cepogo
5	33090405	Munggur	Kembang Sari	Musuk
6	33090606	Brajan	Brajan	Mojosongo
7	33090807	Cinta Kasih	Jatirejo	Sawit
8	33090808	Mandiri	Guwokajen	Sawit
9	33090909	Mugi Lestari	Dukuh	Banyudono
10	33091010	Mawar	Cermo	Sambi

11	33091211	Ceria	Pulutan	Nogosari
12	33091212	Flamboyan	Jeron	Nogosari
13	33091313	Nusa Indah	Wates	Simo
14	33091314	Maju Rahayu	Gunung	Simo
15	33091415	Poncowati	Manyaran	Karanggede
16	33091416	Mulyo	Pinggir	Karanggede
17	33091717	Gemilang	Bawu	Kemusu
18	33091718	Sinar	Watugede	Kemusu
19	33091819	Asyifa	Bolo	Wonosegoro
20	33091920	Cerme Indah	Cerme	Juwangi
21	33092121	Pundung	Sangup	Tamansari
22	33092222	Teratai	Kedungpilang	Wonosamodro
23	33090223	Ngudi Lestari	Ngagrong	Ampel
24	33090224	Kencono Wungu	Ngampon	Ampel
25	33090525	Lestari	Kiringan	Boyolali
26	33090626	Madu Manis	Madu	Mojosongo
27	33090727	Merah Putih	Gumukrejo	Teras
28	33090728	Teratai	Krasak	Teras
29	33091029	Barokah	Ngaglik	Sambi
30	33091130	Gunung Wijil	Giriroto	Ngemplak
31	33091131	Pusposari	Sobokerto	Ngemplak
32	33091532	Karanggatak Penggung	Karanggatak	Klego
33	33091533	Soko	Sendangrejo	Klego

34	33091634	Kencana	Semawung	Andong
35	33091635	Derasan	Sempu	Andong
36	33091936	Sejahtera	Pilangrejo	Juwangi

Sumber : Data Jumlah Kampung KB Boyolali, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali, (2020)

Dukuh Ngargoyoso Desa Guwokajen, merupakan salah satu Dukuh yang ditunjuk pertama kali sebagai penyelenggara program kampung KB di Kecamatan Sawit yang dibentuk dengan nama Kampung KB “Mandiri”. Kampung KB “Mandiri” dianggap sebagai wilayah yang memenuhi ketiga kriteria penyelenggara program sesuai tabel 2 yaitu berlokasi di daerah terpencil dan jauh dari perkotaan; pembangunan yang belum tersentuh; padat penduduk; sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan dan perekonomian yang rendah; jumlah akseptor KB aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah daripada capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; dan tingkat *unmet need* lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Ketua Pembina Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang pada awalnya tidak menyangka ternyata masih ada dukuh dengan kondisi yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, bahkan apabila dibandingkan dengan Kampung KB “Elok” di Desa Jatirejo, dilihat dari segi kriteria wilayah Kampung KB “Mandiri” lebih memprihatinkan. (Hasil wawancara Ketua PLKB Kecamatan Sawit, Januari 2021).

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Guwokajen, ketidakmerataan kondisi berbagai aspek di Dukuh Ngargoyoso tersebut membutuhkan pengelolaan kampung

KB “Mandiri” yang lebih optimal. Pengelolaan program merupakan suatu aspek penting yang dilakukan dengan menggerakkan sumberdaya untuk mencapai efektivitas dan keberhasilan program (Afifiddin,2010:3). Dalam penelitian Setyo Eko Widodo, (2019), *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam program Kampung KB adalah pihak-pihak yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) di masing-masing tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Menurut Buku Pedoman Pengelolaan Program Kampung KB (2017), *stakeholders* yang diharapkan terlibat dalam program Kampung KB ini diantaranya Pemerintah Pusat melalui BKKBN; BKKBN Provinsi; DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak); Kepala Desa; Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB); PPKBD/ Sub PPKBD; Kelompok Kerja (Pokja) dan Kelompok Kegiatan (Poktan) kampung KB. Seluruh *stakeholders* diharapkan partisipatif dan saling membangun kerjasama dalam pengelolaan program dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pelaporan dan pertanggung jawaban.

Permasalahan terkait peran *stakeholders* dalam tahapan pengelolaan program kampung KB mulai tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban masih sering muncul baik dari *stakeholders* tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga tingkat desa. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pemangku kepentingan tingkat desa yang terkait dengan pengelolaan program Kampung KB “Mandiri” yang menyatakan bahwa beberapa tugas, pokok, fungsi belum dijalankan secara keseluruhan oleh masing-masing pemangku kepentingan, masih kurangnya sumberdaya dalam pengelolaan program,

serta masih adanya beberapa target yang meleset dalam pengelolaan program Kampung KB “Mandiri”. (wawancara awal peneliti dengan Ketua PLKB Kecamatan pada Januari 2021).

DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) selaku OPD-KB Kabupaten Boyolali ternyata belum mampu mengejar target kinerja di tahun 2020. Berdasarkan dokumen LKJIP (Laporan Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Boyolali Tahun 2020, Dari 184 (seratus delapan puluh empat) indikator kinerja yang tercantum dalam PK (Perjanjian Kerja) DP2KBP3A ternyata masih ada sembilan (9) indikator kinerja (4,89%) dengan capaian kurang dari 55% (kategori kurang). Indikator yang masuk dalam kategori kurang yaitu cakupan peserta KB di Kabupaten Boyolali yang hanya mencapai angka 40,857 dari 100 target yang ada. Rendahnya angka pencapaian target tersebut perlu menjadi perhatian serius DP2KBP3A supaya lebih meningkatkan peran dan keterlibatannya dalam pengelolaan Program Kampung KB.

Masih minimnya personil sumberdaya manusia, terutama PLKB dan DP2KBP3A Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan program Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso dinyatakan oleh Ketua Pembina Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tingkat Kecamatan Sawit dan Ketua Seksi Advokasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan DP2KBP3A. Sejak awal pembentukan kampung KB hingga pertengahan tahun 2020 jumlah PLKB masing-masing 1 (satu) orang. 1 (satu) PLKB mengelola 2 (dua) Kampung KB sehingga terdapat program

kampung KB yang terbengkalai bahkan tidak berjalan (Hasil wawancara awal peneliti dengan Ketua PLKB Kecamatan Sawit, Januari 2021).

Berdasarkan pernyataan Ketua PLKB tingkat Kecamatan Sawit, program kegiatan di Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso, yakni Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), PIK-R, dan UPPKS belum terselenggara secara menyeluruh. Begitu pula dengan beberapa kader program BKB, BKR, BKL, PIK-R yang cenderung pasif dalam mengelola kegiatan secara berkelanjutan. jika dibandingkan kader-kader di desa lain dalam lingkup kecamatan sawit, performa dan keaktifan kader di Desa Guwokajen masih kurang (Hasil wawancara awal peneliti dengan Ketua PLKB Kecamatan Sawit, Januari 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan peneliti, dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi pengelolaan Kampung KB “Mandiri” oleh *stakeholders* terkait masih banyak permasalahan atau dapat dikatakan kurang optimal. Masih kurang optimalnya pengelolaan Program Kampung KB di Kabupaten Boyolali, khususnya Dukuh Ngargoyoso tak luput dari peran dan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan program Kampung KB. Adanya indikasi masalah peran *stakeholders* yang kurang dalam tahap-tahap pengelolaan program Kampung KB beserta hambatan dalam pengelolaan program kampung KB “Mandiri” menjadi topik penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Maka dari itu, penulis mengambil judul ***“Analisis Peran Stakeholders dalam Program Kampung KB di Kabupaten***

*Boyolali (Studi Kasus Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit).*

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. *Stakeholders* yang terlibat dalam program Kampung KB belum menjalankan tugas, pokok, fungsi masing-masing secara maksimal.
2. Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada Pembina Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Sawit dan DP2KBP3A dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri”.
3. Beberapa indikator kinerja belum dicapai oleh DP2KBP3A sebagai Organisasi Perangkat Daerah KB Kabupaten Boyolali serta cakupan peserta KB tahun 2020 yang masih jauh dari target.
4. Program Tribina Plus (BKB, BKR, BKL, UPPKS) dan PIK-R belum berjalan secara menyeluruh.
5. Partisipasi masyarakat maupun pengurus Kampung KB masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program Kampung KB “Mandiri” masih rendah.

### **1.2.2. Masalah Penelitian**

1. Bagaimana analisis peran stakeholders dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso Desa Guwokajen?

2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan Program Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso Desa Guwokajen?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan pengelolaan Kampung KB “Mandiri” di Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kabupaten Boyolali.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a) Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan terhadap analisis peran *stakeholders* beserta hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kabupaten Boyolali.
- b) Sebagai bahan studi pustaka terkait analisis peran *stakeholders* beserta hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kabupaten Boyolali.
- c) Sebagai bahan kajian dan sumber literatur bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan topik yang terkait dengan analisis peran *stakeholders*

beserta hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kabupaten Boyolali.

## **2. Kegunaan Praktis**

### a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian membantu peneliti dalam menganalisis dan mendeskripsikan peran *stakeholders* beserta hambatan-hambatan yang ada dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri”,Dukuh Ngargoyoso.

### b) Bagi Masyarakat atau Pemerintah

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi, saran, dan pertimbangan bagi pemangku kepentingan/ pengelola maupun sasaran program yang terlibat dalam pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) beserta hambatan yang ada didalamnya sehingga isu / permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan program tersebut dapat segera ditangani secara efektif.

## 1.5. Kajian Teori

### 1.5.1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 4. Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun, Judul, Nama Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Rahman HM, Junaidi Indrawadi, (2019) <i>“Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang.”</i> Journal Of	Mendesripsikan implementasi Program Kampung KB serta kendala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB Berok	Kualitatif	Program Kampung KB yang diselenggarakan melalui program BKB,BKR,dan BKL masih ditemukan kendala dalam implementasi program, antara lain : (1) kurangnya dukungan <i>stakeholder</i> ; (2) ketidaksiapan pengelola program; (3) terbatasnya kualitas SDM , dan (4) anggaran yang tidak memadai. Cakupan kegiatan dalam program Kampung KB sempit, hanya berfokus pada penyuluhan yang kurang efektif tanpa melakukan pendampingan, penyaluran, dan evaluasi. Peran <i>stakeholder</i> tidak begitu terlihat sehingga program berjalan kurang optimal.

	Civic Education Volume 2 Nomer 4 2019.			
2.	Harmiati, dkk. (2020) “ <i>Analisis Pemetaan Collaborative Governance dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bengkulu</i> ”. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Vol 9 No 1.	Mengolaborasikan penelitian DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan Program Keluarga Berencana (KB) Kota Bengkulu.	Kualitatif	<i>Stakeholder</i> kunci dalam pelayanan Program KB adalah Institusi Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Kolaborasi antar <i>stakeholder</i> dalam implementasi Program Kampung KB dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama advokasi dilakukan oleh <i>stakeholder</i> tinggi tingkat provinsi (Kepala BKKBN, Kepala DP3AP2KB, Ketua Koalisi Kependudukan). Tingkat kedua berada di tingkat kota (Kepala DP3AP2KB beserta jajarannya,serta koalisi kependudukan tingkat kota dengan mengadvokasi lembaga mitra). Tingkat ketiga dilaksanakan oleh PLKB/ PKB, Camat, Lurah, Puskesmas, Koramil, dan PKK Kecamatan/ Kelurahan. PLKB/PKB sebagai <i>stakeholder</i> lini lapangan berkewajiban melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada kader PPKBD, sub PPKBD, dan pos KB.

3.	Berliana Mustika Rani, (2018). <i>“Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas di Kota Surabaya”</i> . Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Vol.10 No2.	1.Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> 2.Mendeskripsikan kategori <i>stakeholder</i> 3.Mengetahui interelasi (hubungan) antar <i>stakeholder</i> dalam kebijakan penyelenggaraan jaringan utilitas di Kota Surabaya.	Kualitatif	<i>Stakeholder</i> diidentifikasi menjadi 3 kategori berdasarkan teori Reed : (1) <i>Stakeholder</i> primer (PDAM Surya, dan Dinas Pekerjaan Umum) ; (2) <i>Stakeholder</i> sekunder (Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dishub,Diskominfo, Satuan Polisi Pamong Praja) ; (3) <i>Stakeholder</i> kunci (Pemerintah Kota Surabaya, Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Administrasi Pembangunan). Sedangkan interelasi (hubungan) antar <i>stakeholder</i> masih kurang baik karena minimnya koordinasi dan kerjasama.
4.	Regina, Budiman Rusli, Candradewini, (2020). <i>“Koordinasi Pengembangan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten</i>	Menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi pengembangan program Kampung Keluarga Berencana	Kualitatif	Peran multisektor turut dilibatkan dalam implementasi program, namun <i>stakeholder</i> seperti berjalan sendiri-sendiri dan minim koordinasi antara <i>stakeholder</i> satu dengan <i>stakeholder</i> lainnya. Kerjasama antar- <i>stakeholder</i> belum efektif dan masing-masing tupoksi belum dilakukan maksimal sehingga muncul <i>overlapping</i> antar- <i>stakeholder</i>

	<i>Bangka Barat</i> ". Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol,6 No.1 (65-81)	di Kabupaten Bangka Barat.		dalam implementasi program. Koordinasi antar- <i>stakeholder</i> mengarah pada ambiguitas peran dan muncul konflik tentang "siapa akan melakukan apa". Ketidakjelasan dalam pembagian tugas berdampak pada penentuan skala prioritas.
5.	Ratna Kusumasari Purbani, Yodi Mahendradhata, Yanri Wijayanti Subronto, (2019) " <i>Analisis Stakeholder dalam Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Grobogan.</i> "Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol.08 (136-141).	Mendeskripsikan perencanaan strategis Pemerintah Daerah dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Grobogan	Kualitatif	Penelitian tersebut membagi <i>stakeholder</i> menjadi 3 kategori: Kelompok Pelaksana Kegiatan, Kelompok Pembuat Kebijakan, dan Kelompok Penyanggah Dana. <i>Stakeholder</i> dibagi menjadi <i>stakeholder</i> primer (pihak pelaksana kebijakan atau program), <i>stakeholder</i> sekunder (OPD terkait yang tidak secara eksplisit bertanggungjawab), dan <i>stakeholder</i> kunci. Adapun peran dan keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam perumusan kebijakan belum maksimal, karena sebagian besar tidak terlibat dalam perumusan regulasi dan tidak mengetahui keberadaan regulasi tersebut. Selain itu, <i>stakeholder</i> berperan dalam desain dan advokasi program, serta mobilisasi sumberdaya.
6.	Eko Setyo Widodo, (2019). " <i>Peran</i>	Mendeskripsikan dan menganalisis peran	Kualitatif	Peran <i>stakeholder</i> dianalisis menggunakan teori Brysson dengan menyusun <i>stakeholder</i> yang terlibat menurut

	<p><i>Stakeholder dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana (Studi Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi).”</i></p>	<p><i>stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan Kampung KB di Desa Jambewangi, Kabupaten Banyuwangi.</i></p>		<p><i>interest</i> (kepentingan) dan <i>power</i> (kekuasaan). Pemkab dan jajarannya direpresentasikan sebagai <i>context setter</i>. <i>Leading sector</i> diisi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB). <i>Stakeholder subject</i> ditempati oleh kader Kampung KB sebab memiliki kepentingan dan harapan tinggi terhadap program. Disperinangan dan Disperta adalah <i>stakeholder</i> dengan kepentingan dan kekuasaan yang rendah sehingga masuk pada kelompok <i>crowd</i>.</p>
7.	<p>Agus Raikhani,dkk. “<i>Analisa Kontribusi Program Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK di Kab.Jombang, Provinsi Jawa Timur</i>. Hal. 101-113.</p>	<p>Menganalisis dan mendeskripsikan Program Kampung KB dalam upaya meningkatkan Program KKBPK.</p>	Kualitatif	<p>Program Kampung KB membawa kontribusi yang signifikan untuk menguatkan Program KKBPK, namun kontribusi itu belum maksimal karena ego sektoral diantara <i>stakeholder</i> masih sangat kuat pada proses pelaksanaan program dan penganggaran sehingga dibutuhkan adanya <i>political will</i> dan model sinergitas antar <i>stakeholder</i>. Perencanaan yang partisipatif dari masyarakat serta pemberdayaan potensi yang ada menjadi salah satu kunci keberhasilan Program Kampung KB.</p>

8.	Riski Hoeriah. <i>“Implementasi Program          Kampung KB di          Kampung Kaliwadas          Kelurahan Lopang          Kecamatan Serang Kota          Serang”</i> .SKRIPSI. 2019	Mengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB).	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung KB melibatkan banyak <i>stakeholder</i> . <i>Stakeholder</i> yang memberikan pengaruh paling tinggi ada pada BKKBN dan DP3AKB. Kampung KB tidak hanya tentang pelayanan KB, tapi juga BKB,BKL,BKR,PIK-R,dan UPPKS yang perlu didukung oleh lintas sektor. Namun partisipasi masyarakat dan Kelompok Kegiatan (Poktan) terhadap implementasi Kampung KB masih rendah meskipun sudah dilakukan pembinaan ketua pokja. Hal itu dikarenakan <i>skill</i> dan pengetahuan yang masih minim untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Program kependudukan di Kampung KB belum diselenggarakan karena minimnya koordinasi dengan lintas sektor. Penyusunan rencana kegiatan juga belum direncanakan dengan baik dan matang. Adapun <i>leading sector</i> dari Kampung KB adalah pelaksana di lini lapangan, sedangkan lintas sektornya adalah SKPD lain.
----	---	--	------------	---

9.	Rahmawati, Muhammad Nadjib, Muhammad Farid, (2017). <i>“Pola Komunikasi Sinergitas Mitra Kerja Untuk Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat”</i> . Jurnal Analisis, Vol. 6 No.2 (178-183).	Mengetahui : (1) Bentuk sinergitas mitra kerja; (2) pola komunikasi; dan (3) hambatan yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan sinergitas mitra kerja dalam rangka menyukseskan pembentukan Kampung Keluarga Berencana.	Kualitatif	<p>Dari hasil pengamatan di lapangan, pola komunikasi <i>antar stakeholder</i> masih dalam tahap Pola Rantai dimana dari BKKBN berkoordinasi dengan Gubernur, kemudian Gubernur berkomunikasi dengan <i>stakeholder</i> lainnya seperti Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial &amp; DP3P2KB serta pelaksana di lini lapangan. Komunikasi antar-<i>stakeholder</i> masih bersifat satu arah dan minim koordinasi. Dominasi pemerintah sangat terlihat dari perencanaan hingga pelaksanaan program menunjukkan bahwa tidak adanya sinergitas dengan <i>stakeholder</i> lainnya (Rahmawati dkk,2013).</p> <p>Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pola komunikasi dalam membangun sinergitas mitra kerja, yaitu : 1) komitmen yang kuat dari <i>stakeholder</i> di semua lini (Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan); 2) Intensitas opini publik tentang Program KKBPK yang berintegrasi dengan lintas sektor; 3) optimasilsasi fasilitasi serta</p>
----	--	---	------------	--

				dukungan <i>stakeholder</i> ; 4) komitmen dan dedikasi pengelola program di semua tingkat termasuk PKB dan PLKB.
10.	Mardiyono and Lely Hermini, (2017). <i>“Family Empowerment through Family Planning Village in Effort to Increase KKBPK and Related Programs in East Java (Studies in Bondowoso and Bangkalan). International Journal of Humanities and Social Science Invention, Vol.6 Issue 5, (43-47).</i>	Mengeksplorasi hasil Program KKBPK dan program terkait lainnya dalam rangka meningkatkan keluarga kecil yang berkualitas dan sejahtera.	Kualitatif	Penelitian tersebut menunjukkan hasil identifikasi SKPD KB maupun lintas sektor yang terlibat dalam program Kampung KB beserta intervensi <i>stakeholder</i> terkait pelaksanaan program. Setelah melihat intervensi <i>stakeholder</i> dalam program tersebut, peneliti melihat monitoring (pemantauan) untuk melihat keberhasilan Kampung KB. Adapun 3 (tiga) indikator yang dievaluasi adalah keberhasilan input, proses, dan output. Kelemahan dari pelaksanaan Program Kampung KB adalah masih kurang proporsionalnya jumlah petugas lapangan/PKB. Kualitas advokasi dan KIE dari PKB/PLKB masih rendah. Dana yang terbatas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program.
11.	Novi Rosyita Dewi. (2020). <i>“Sinergitas</i>	Untuk mengetahui sinergitas kader dan	Kualitatif	Keberhasilan sinergi dalam pelaksanaan program Kampung KB diukur dengan menggunakan indikator Doctoroff yang

	<i>Kader dan Aparatur Gampong dalam Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh</i> ".SKRIPSI.	aparatur Gampong dalam pelaksanaan program Kampung Keluarga Berencana.		mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas. Dalam implementasi program dibutuhkan komunikasi dua arah yang baik antar <i>stakeholder</i> . Komunikasi yang baik menimbulkan umpan balik/ <i>feedback</i> yang cepat diantara <i>stakeholder</i> . Sementara itu, kepercayaan menjadi kunci dari sinergi dalam implementasi suatu program. Sedangkan kreativitas menyangkut kemampuan dan metode yang digunakan <i>stakeholder</i> dalam menyelesaikan masalah.
12.	Abdul Kholiq, Windu.(2019). "Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana oleh KBP3A dalam Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Sejahtera". Jurnal	Untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan program kampung KB oleh KBP3A	Kualitatif	Pelaksanaan program Kampung KB di Desa Babakan belum berjalan optimal karena masih kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas KBP3A. Selain itu, sumber daya manusia yang kurang juga mengakibatkan minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih pasifnya masyarakat untuk ikut serta dalam program ini.

	Moderat, Vol 5 No 2, hal 101-100			
--	-------------------------------------	--	--	--

Penelitian penulis terkait analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Program Kampung KB sudah pernah diteliti dalam penelitian-penelitian terdahulu. Namun dalam penelitian ini, peneliti membuat tulisan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yang ditinjau dari beberapa aspek seperti fokus penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, maupun tujuan penelitian dari masing-masing penulis. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan dalam tabel 4 di atas, sebagian besar membahas mengenai implementasi Program Kampung KB berikut peran-peran, kepentingan, dan dampak yang ditimbulkan dari dilaksanakannya program kebijakan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus penelitian peneliti adalah analisis peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan program kampung KB “Mandiri” dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi peran *stakeholders* yang terlibat dan menganalisa kondisi peran dalam tahapan pengelolaan Kampung KB. Selain itu, peneliti juga menganalisis hambatan-hambatan yang terdapat dalam pengelolaan program Kampung KB di Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen

### **1.5.2. Administrasi Publik**

Pasolong (2007) mengemukakan Administrasi Publik sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Sedangkan Ibrahim (2007) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pembangunan dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.

Menurut Chandler dan Plano (1988), Administrasi Publik merupakan suatu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola keputusan dari kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan administrasi publik sebagai bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa sebagai regulator, aktif dan inisiatif dalam mengatur dan mengambil keputusan terbaik untuk masyarakat karena masyarakat diasumsikan sebagai pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Adapun Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dikutip dalam Pasolong, (2007:7) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek dalam administrasi publik, meliputi:

1. Implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Berdasarkan definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukan sekelompok

orang yang diorganisasi dan dikoordinasikan untuk memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat melalui proses formulasi, implementasi, serta mengatur keputusan dari suatu kebijakan.

### **1.5.3. Paradigma Administrasi Publik**

Administrasi Publik dikembangkan menjadi kajian ilmu melalui lima paradigma yang tiap paradigma itu memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan lokus dan fokusnya. Lokus menggambarkan dimana bidang ini berada secara institusional serta tempat dari studi tersebut. Sedangkan fokus menunjukkan sasaran spesialisasi bidang studi yang diambil. Kelima paradigma administrasi publik dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Paradigma I : Paradigma Dikotomi Politik Administrasi, tahun 1900-1926**

Paradigma ini dicetuskan oleh Frank J. Goodnow (1900) dan Leonard D. White (1926) dalam bukunya yang berjudul *Politics and Administration*. Paradigma dikotomi politik-administrasi menegaskan dwifungsi administrasi publik, yaitu politik dan administrasi. Dalam paradigma I (satu) administrasi publik ini menekankan pada lokus, yakni tempat dimana administrasi publik berada. Goodnow beserta pengikutnya berpandangan bahwa lokus administrasi publik berada pada birokrasi pemerintah sedangkan fokusnya tidak menjadi persoalan.

#### **2. Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi, tahun 1927-1937**

Paradigma 2 (dua) ditandai dengan terbitnya buku karya Willoughby yang berjudul *Principles of Public Administration* yang menegaskan tentang adanya prinsip-prinsip ilmiah terkait administrasi. Perkembangan paradigma ini cukup dramatis dan menyasar hingga universitas dan akademi dengan membuka program administrasi publik serta dibentuknya asosiasi profesional di berbagai tempat. Paradigma ini berkaitan dengan “fokus” administrasi publik sedangkan lokusnya tidak menjadi persoalan karena prinsip administrasi dianggap berlaku di semua setting administrasi, baik organisasi publik maupun privat. Fokus administrasi publik ditekankan pada perlunya menerapkan prinsip-prinsip administrasi seperti efisiensi, efektivitas, produktivitas, disiplin, kerjasama, organisasi, dan sebagainya.

### **3. Paradigma 3 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, tahun 1950-1970)**

Pada fase ini, administrasi publik kembali pada ilmu politik karena adanya pembaruan definisi mengenai lokusnya yaitu di birokrasi pemerintah dan fokusnya masih kabur. Adapun tokoh dalam paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik ini adalah Chester I Barnard, Dwight Waldo, Herbert Simon, dan lain-lain. Paradigma 3 merupakan upaya untuk meninjau kembali jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Pelaksanaan administrasi publik tidak bisa bebas nilai (*free value*) dan bisa diintervensi oleh lingkungan politik.

#### **4. Paradigma 4 : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi : tahun 1956-1970)**

Pada paradigma 4 (empat) ini, para tokoh administrasi publik seperti Herbert Simon, Keith Henderson, dan James March berupaya mencari alternatif lain untuk menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu. Pada fase ini administrasi publik kehilangan identitas dan karakteristiknya dalam konteks manajemen yang luas. Hal ini dikarenakan pada periode ini fokus administrasi publik menerapkan teori-teori organisasi, dan ilmu manajemen sehingga tidak ada perbedaan fokus administrasi publik dengan administrasi bisnis. Keduanya menekankan fokusnya pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

#### **5. Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administasi Publik : tahun 1970-**

Pada tahun 1970, terjadi pemisahan administrasi publik dari manajemen maupun ilmu politik dan pada tahun itu juga administrasi publik mulai diakui sebagai suatu bidang ilmu. Paradigma 5 memiliki lokus pada masalah-masalah publik dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik, dan *political-economy*. Pada periode ini, administrasi publik tetap menjadi administrasi publik dengan menjalankan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi administrasi publik.

Dari paparan kelima paradigma administrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma ke-5 yakni Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik. Karena fokusnya pada kebijakan publik, yakni pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan memiliki lokus yang bertempat di Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

#### **1.5.4. Konsep Kebijakan Publik (*Public Policy*)**

Istilah “kebijakan” atau “*policy*” identik untuk menggambarkan perilaku seorang aktor dalam suatu bidang tertentu. Sebagai suatu ilmu yang bersifat multi-disipliner, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1955:2), menulis definisi kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (*a projected of goals, values, and practices*). Berbeda dengan Anderson (dalam Hill and Hupe, 2002) yang mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (1972) dalam Knoepfel *et al* (2007:23), “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (Kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Sementara itu, kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai

suatu tujuan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat James E. Anderson (1970) yang menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”* (Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rancangan program yang dibuat oleh pemerintah dengan adanya tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh sejumlah aktor terkait yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

#### **1.5.4.1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik melalui proses yang kompleks, dengan melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Adapun tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (Winarno,2002:29) adalah sebagai berikut :



Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34)

### 1. Penyusunan agenda

Pemangku kepentingan menempatkan isu atau permasalahan pada agenda publik. Masalah tersebut tidak serta merta masuk dalam agenda publik, akan tetapi melalui tahap penyeleksian terlebih dahulu. Dari banyak masalah yang ada, hanya beberapa masalah masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Beberapa masalah diputuskan untuk tidak dibahas, ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau dilakukan penundaan untuk jangka waktu yang lama.

### 2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah dipilah dan telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Permasalahan-permasalahan tersebut diupayakan untuk dicarikan pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut bersumber dari beberapa opsi alternatif pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dengan pendapat, saran, masukan dari masing-masing aktor terkait solusi problematika yang dibahas, akan diputuskan kebijakan yang paling solutif dan efektif dalam pemecahan masalah.

### 3. Adopsi Kebijakan

Pada tahap ini, dari sekian alternatif yang diusulkan oleh para perumus kebijakan pada tahap formulasi, akhirnya dipilih salah satu alternatif kebijakan

dengan didukung dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

#### 4. Implementasi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang telah dipilih pada tahap adopsi kebijakan kemudian diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Jika tidak demikian, program kebijakan tersebut hanya akan menjadi wacana semata. Kebijakan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dan memobilisasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Berbagai kepentingan akan saling berkompetisi, beberapa saling mendukung dan sisanya akan menentang program yang ada.

#### 5. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diimplementasikan akan dievaluasi untuk menilai dan melihat seberapa besar dampak yang diinginkan, apakah mencapai target atau sebaliknya. Penilaian akan baik apabila kebijakan tersebut dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tinggi rendahnya penilaian diukur berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi acuan besaran tujuan dan dampak yang dicapai.

Dari beberapa uraian lima tahapan kebijakan publik tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tahapan kebijakan mulai dari penyusunan agenda hingga evaluasi kebijakan digunakan dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan keberadaan dan peran *stakeholders* dibutuhkan dan selalu ada dalam setiap tahapan kebijakan publik.

### 1.5.5. Analisis Stakeholders

Menurut Bourne dalam Purnawan (2014:88), analisis stakeholders sangat penting untuk menjaga dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan. Menurut Reed dalam Roslinda (2012:79), menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan cara : (1) **Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingannya, Mengelompokkan dan mengategorikan pemangku kepentingan, (3) Menyelidiki hubungan antar pemangku kepentingan.**

Menurut Race dan Millar dalam Iqbal (2007:92), menekankan beberapa intisari dalam analisis pemangku kepentingan yang perlu mendapatkan perhatian yaitu : (1) Pemangku kepentingan itu sendiri, (2) Partisipasi, (3) Keterkaitan sebagai bentuk dari partisipasi yang bersifat lebih dari sekedar konsultasi. Sedangkan menurut David Viney (2004), bahwa tahap pertama dalam menganalisis stakeholders yaitu menetapkan pengaruh dan kepentingan, dan tahap kedua adalah memahami tingkat kesepakatan dan komitmen dari stakeholders.

Dari beberapa uraian analisis peran tersebut, penulis melakukan analisis stakeholders dengan menggunakan **teori Reed dalam Roslinda (2012: 79)** melalui identifikasi stakeholders kemudian mengklasifikasikan atau mengelompokkan peran stakeholders.

#### **Peran Stakeholders**

Peran menurut Soekanto (2002,h243) diartikan sebagai aspek dinamis dari status (kedudukan), jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai kedudukannya. Menurut Wirutomo dalam Berry (1981) berpendapat bahwa

peranan yang memiliki kaitan dengan pekerjaan dan seseorang menjalankan segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan peranan yang dimilikinya. Adapun yang menyatakan bahwa peranan merupakan perilaku yang dituntut untuk dijalankan oleh pihak lain kepada seseorang yang memiliki kedudukan tertentu. (Bruce J Cohen dalam (Irwan, 2018).

Menurut Sarbin dan Allen dalam Thoha (2003:263) suatu peranan dirumuskan sebagai rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Menurut Rafid (2009) dalam Salsabila & Santoso (2018) yang dimaksud peran merupakan suatu keterlibatan secara aktif dalam suatu kegiatan guna menggapai tujuan yang telah ditentukan yang dilakukan baik pribadi maupun berkelompok yang diatur sesuai dengan kemampuan yang memadai, ikut serta dalam suatu mewujudkan tujuan dengan merasakan tanggungjawabnya karena memiliki kesadaran ikut terlibat.

Adapun istilah *stakeholder* pertama kali dicanangkan oleh Freeman (1984:31) dalam tulisannya yang berjudul "*Strategic Management A Stakeholder Approach*" dan mengartikan *stakeholder* sebagai "*Any group or individual who can affect or be affected by the achievement of an organization's objective*" (*Stakeholder* adalah kelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi). Sedangkan Brysson (2004:30) mengartikan *stakeholder* sebagai individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumberdaya atau hasil (*output*) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut.

Sedangkan Freeman dalam Wakka (2014:49-50) mengemukakan bahwa *stakeholders* merupakan individu atau kelompok atau lembaga yang mampu memberikan pengaruh atau diberikan pengaruh dari keputusan yang dapat diambil. Menurut Anderson dalam (Kusumanegara, 2010) bahwa dalam studi proses kebijakan yang mana para aktor kebijakan berasal dari berbagai macam kalangan yang termasuk dalam struktur politik dan intra struktur. Para aktor tersebut, diantaranya legislatif, eksekutif, yudikatif, kelompok penekan, partai politik, media massa, organisasi komunitas, birokrasi, NGO, swasta dan kelompok *think thank*.

Menurut Buse (2012:254), *stakeholder* merupakan individu atau kelompok dengan kepentingan substantif dalam suatu persoalan, termasuk mereka yang memiliki peran dalam mengambil keputusan atau melakukannya. *Stakeholder* juga didefinisikan sebagai semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap siklus pengembangan kebijakan, mulai dari penyusunan, advokasi, implementasi, hingga dampak dari sebuah kebijakan baik langsung maupun tak langsung. Sedangkan Reed, M.S. (2008) mengartikan *stakeholder* sebagai orang-orang, atau kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari satu kegiatan/ proyek baik pengaruh positif maupun negatif, ataupun sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh terhadap hasil keluaran program/proyek.

Gibson (2000:245) dalam Friedman dan Miles (2000:245) *stakeholder* adalah individu, kelompok, maupun organisasi yang berinteraksi, saling tergantung, dan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik,

atau tujuan organisasi. Sedangkan Freedman (1975) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* apabila memiliki karakteristik sebagaimana pendapat dari Budimanta dkk (2008) yakni memiliki : kekuasaan, legitimasi, serta kepentingan terhadap program.

### **Tahap Identifikasi Stakeholders**

Menurut Munawaroh dalam Murib (2021:44) berpendapat bahwa *stakeholder* merupakan pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mendapatkan pengaruh dan mempunyai kepentingan dalam suatu program / kebijakan yang keahliannya mampu memberikan pengaruh. Menurut Maryono *et al.* dalam (Yosevita, 2015:25-26) bahwa *stakeholder* diidentifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang mendapatkan dampak secara positif maupun negatif dari suatu kebijakan / program dan memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan / program tersebut. *Stakeholders* ini juga diketahui memiliki pengaruh sehingga harus dilibatkan dalam setiap agenda atau tahapan-tahapan suatu kebijakan / program.
2. *Stakeholders* kunci merupakan *stakeholder* yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan secara legal. *Stakeholders* kunci juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu kebijakan / program.

3. *Stakeholders* sekunder / penunjang merupakan *stakeholder* yang mempunyai kepedulian yang besar dalam melakukan perkembangan suatu kebijakan / program namun tidak mempunyai kepentingan secara langsung baik pengelolaan maupun perkembangan kebijakan/program. *Stakeholder* penunjang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan yang dapat digolongkan sebagai penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak swasta. Dalam beberapa kesempatan, *stakeholder* penunjang dapat menjadi kelompok kunci yang memiliki kepentingan formal maupun informal.

### **Tahap Klasifikasi Stakeholders**

Menurut Nugroho (2014) peran *stakeholders* diklasifikasikan menjadi 5 (lima), diantaranya :

1. *Policy creator*, yakni *stakeholder* yang memiliki peran mengambil keputusan dan menentukan suatu kebijakan / program.
2. Koordinator, yakni *stakeholder* yang memiliki peran melakukan koordinasi antara *stakeholder* satu dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam suatu kebijakan / program.
3. Fasilitator, yakni *stakeholder* yang memiliki peran dalam memberikan fasilitas dan memberikan kecukupan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran.
4. Implementor, yakni *stakeholder* yang memiliki peran melaksanakan kebijakan / program yang termasuk kelompok sasaran di dalamnya.

5. Akselerator, yakni *stakeholder* yang memiliki peran untuk melakukan mempercepat dan pemberi kontribusi supaya suatu kebijakan / program terlaksana tepat sasaran dan lebih cepat tercapainya.

Dari berbagai pengertian para ahli terkait konsep peran dan definisi *stakeholder*, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran *stakeholder* merupakan sejumlah perilaku yang diharapkan oleh seseorang terhadap semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap pengelolaan program, mulai dari perencanaan, penggalakan sumber daya, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga dampak dari sebuah kebijakan baik langsung maupun tak langsung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan klasifikasi *stakeholder* yang membagi *stakeholder* menjadi 3 yakni *stakeholders* primer, *stakeholders* kunci, dan *stakeholders* sekunder dan mengategorikan *stakeholders* berdasarkan peran diantaranya *policy creator*, koordinator, fasilitator, dan implementor.

#### **1.5.6 Kampung Keluarga Berencana (KB)**

Menurut BKKBN dalam Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017), program kampung Keluarga Berencana atau kampung KB merupakan program percontohan dalam penguatan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementrian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholders* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan pada tingkatan pemerintahan terendah (RW/RT) seluruh kabupaten dan kota.

Berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB (2017), Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan intruksi Presiden RI, khususnya sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya didapatkan secara langsung oleh masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB.

Program Kampung KB dirancang sebagai upaya revitalisasi dan rebranding program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi keluarga secara utuh. Kegiatan yang ada di Kampung KB bukan hanya tentang penggunaan dan pemasangan alat kontrasepsi semata, namun merupakan program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)).

Program Kampung KB juga menjadi wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku, dan cara berpikir (*mindset*) masyarakat ke arah yang lebih maju, sehingga kampung dengan kriteria tertinggal dan terbelakang yang menjadi penyelenggara program ini dapat setara dengan kampung-kampung lainnya. Masyarakat yang tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dalam Kelompok Kegiatan (Poktan) Kampung KB, dan keluarga yang tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera/UPPKS ([bkkbn.go.id](http://bkkbn.go.id)).

### **1.5.6.1 Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB)**

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan identik dengan penanganan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Buku Pentunjuk Pedoman Teknis Pengelola KB di Lini lapangan yang dibuat oleh BKKBN pada tahun 2017, pengelolaan program Kampung KB terdiri dari 4 (empat) tahapan yang dirinci sebagai berikut :

#### **1. Perencanaan Program dan Kegiatan**

Tahap perencanaan pengelolaan program Kampung KB dimulai dari penetapan tujuan program, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan program secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh peran pemangku kepentingan didalamnya sehingga bisa tercapai tujuan dari program Kampung KB.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap perencanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah sebagai berikut :

- a. Substansi program dan kegiatan yang direncanakan wajib dicari keterkaitannya dengan Sasaran Strategis Renstra BKKBN 2015-2019
- b. Petugas lapangan (PKB/PLKB) menyiapkan data dan informasi tentang isu strategis, permasalahan dan kebutuhan baik program KKBPK maupun lintas sektor untuk diajukan dalam perencanaan program dan kegiatan Kampung KB.

- c. Rencana pengembangan/ keterpaduan kegiatan lintas sektor/ bidang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan disusun berdasarkan hasil evaluasi data dan informasi wilayah yang tersedia.
  - d. Rencana program dan kegiatan berdasarkan output yang yang diharapkan dan dikelompokkan berdasarkan Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader per Bidang (sesuai Struktur Organisasi yang disusun)
  - e. Rencana program dan kegiatan melalui proses *cascading* untuk melihat keterkaitan dengan indikator-indikator keberhasilan Kampung KB yang telah ditetapkan
  - f. Penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR).
  - g. Telaah kebutuhan dan pemetaan alur pengalokasian anggaran kegiatan, dibiayai oleh APBN perwakilan BKKBN Provinsi, APBD SKPD KB, Alokasi Dana Desa, atau lintas sektor terkait.
2. Pelaksanaan Program atau Kegiatan

Tahap pelaksanaan program merupakan tahapan operasional dalam mengimplementasikan kegiatan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga lini lapangan (RT/RW/Dusun). Pelaksanaan program kegiatan dalam Kampung KB diharapkan dapat terselenggara secara menyeluruh, dari program BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia), PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), hingga UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)).

## 2.1. Indikator Pelaksanaan Program Kampung KB

Indikator diperlukan sebagai tolak ukur apakah pengelolaan program berjalan sesuai rencana dan hasil yang sesuai harapan. Adapun indikator pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) menurut Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### 1. Komitmen *stakeholders* dalam pengelolaan program Kampung Keluarga Berencana (KB)

Menurut Steers dan Porter (1983), komitmen adalah keadaan individu dimana individu menjadi terikat oleh tindakannya dimana tindakan tersebut menimbulkan keyakinan yang menunjang aktivitas dan keterlibatannya. Griffin (2004) menyatakan bahwa individu yang memiliki komitmen tinggi akan melihat dirinya sebagai anggota panjang dari organisasi, sedangkan individu yang memiliki komitmen rendah cenderung melihat dirinya sebagai orang luar dan tidak berkelanjutan dalam sebuah program. Dalam hal ini, pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana, membutuhkan komitmen kuat, dukungan, dan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan program Kampung KB, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, hingga lini terendah yakni tingkat Desa/Kampung.

2. Intensitas Opini Publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan Lintas Sektor

Intensitas Opini Publik tentang Program KKBPK beserta integrasinya dengan lintas sektor merupakan salah satu potensi yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan program Kampung KB. Adanya program Kampung KB berawal dari tidak bergaungnya program KKBPK di telinga masyarakat, sehingga pemerintah merevitalisasi program KKBK dengan dibentuknya Program Kampung KB yang merupakan model miniatur pelaksanaan kebijakan KKBPK secara utuh dan perlu melibatkan lintas sektor. Intensitas opini publik dapat berupa pemahaman masyarakat terkait program KKBPK, kemauan publik untuk ikut serta dalam program, dan sebagainya. Sedangkan integrasi lintas sektor dilakukan dengan membangun hubungan dengan sektor lain yang terkait untuk ikut terlibat dan membantu pembangunan di sektor-sektor tertentu sesuai dengan kebutuhan kampung KB. Apabila intensitas opini publik mengenai program KKBPK meningkat dan banyaknya integrasi dari lintas sektor akan menciptakan ketercapaian keberhasilan program Kampung KB.

3. Optimalisasi Fasilitasi dan Dukungan Mitra Kerja

Optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja merupakan potensi besar yang dapat meningkatkan capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Optimalisasi fasilitasi dilakukan oleh *stakeholders* yang berperan sebagai fasilitator, dengan mengoptimalkan pemberian dana, sarana prasarana, atau fasilitas lain yang

mendukung penyelenggaraan program Kampung KB. Adapun dukungan mitra kerja yang diperlukan adalah mitra kerja lini lapangan dan mitra kerja lintas sektor untuk dapat terlibat aktif membantu pengelolaan program Kampung KB.

#### 4. Semangat dan Dedikasi Pengelola Program di Seluruh Tingkatan Wilayah dan Petugas Lini Lapangan

Adanya semangat dan dedikasi para pengelola program di seluruh tingkatan wilayah beserta petugas lini lapangan dalam pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana memiliki peran penting untuk menunjang keberhasilan dalam pengelolaan program Kampung KB. Semangat dan dedikasi yang tinggi pada pengelola di seluruh tingkatan menjadi indikator keberhasilan dalam mengelola program, termasuk pada petugas lini lapangan yakni PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) Kecamatan Sawit, dan PPKBD/Sub PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) sebagai pengelola inti di lini lapangan.

#### 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban sangat penting dalam pengelolaan sebuah program. Tahap ini terdiri dari rangkaian kegiatan mulai dari pemantauan, evaluasi program, dan pelaporan. Kegiatan pemantauan penting untuk memastikan dan mengetahui pelaksanaan program, mengidentifikasi masalah, dan memastikan apakah kegiatan operasional Kampung KB berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama.

Evaluasi program dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program KKBPK. Hasil evaluasi tersebut nantinya diperlukan untuk merencanakan pengembangan kegiatan-kegiatan program KKBPK yang akan datang dengan melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor.

Pada tahap pelaporan, para *stakeholder* diharapkan untuk rutin melaporkan dalam waktu yang telah ditentukan (bulanan, semesteran, dan tahunan) khususnya bagi Ketua Kampung KB untuk ditembuskan kepada Bupati/ walikota selaku Pembina Kampung KB dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

Berdasarkan seluruh tahapan dalam pengelolaan yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa tahap pengelolaan program terdiri dari perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, dan pertanggungjawaban. Seluruh tahap pengelolaan tersebut membutuhkan peran seluruh *stakeholders* untuk terlibat aktif dalam mengelola program Kampung Keluarga Berencana (KB).

#### **1.5.6.2. Hambatan Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana**

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, pengelolaan program memiliki beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi Kebijakan/Program

*Pertama*, pengelolaan program gagal karena masih samarnya isi kebijakan, tidak terarahnya tujuan, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

*Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan dikelola menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

*Keempat*, gagalnya pengelolaan program disebabkan karena kekurangan sumberdaya-sumberdaya pembantu yakni waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

## 2. Informasi

Pengelolaan program melibatkan peran stakeholders yang memiliki beragam informasi yang berkaitan dengan program dan diharapkan dapat memainkan perannya dengan baik. Namun dalam hambatan informasi justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi sehingga informasi tidak dapat disampaikan langsung kepada sasaran.

## 3. Dukungan

Pengelolaan program akan sangat sulit apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan.

## 4. Pembagian Potensi

Gagalnya pengelolaan suatu program juga ditentukan pada aspek pembagian potensi diantara *stakeholder* yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi

pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan permasalahan jika pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya batasan-batasan yang rancu.

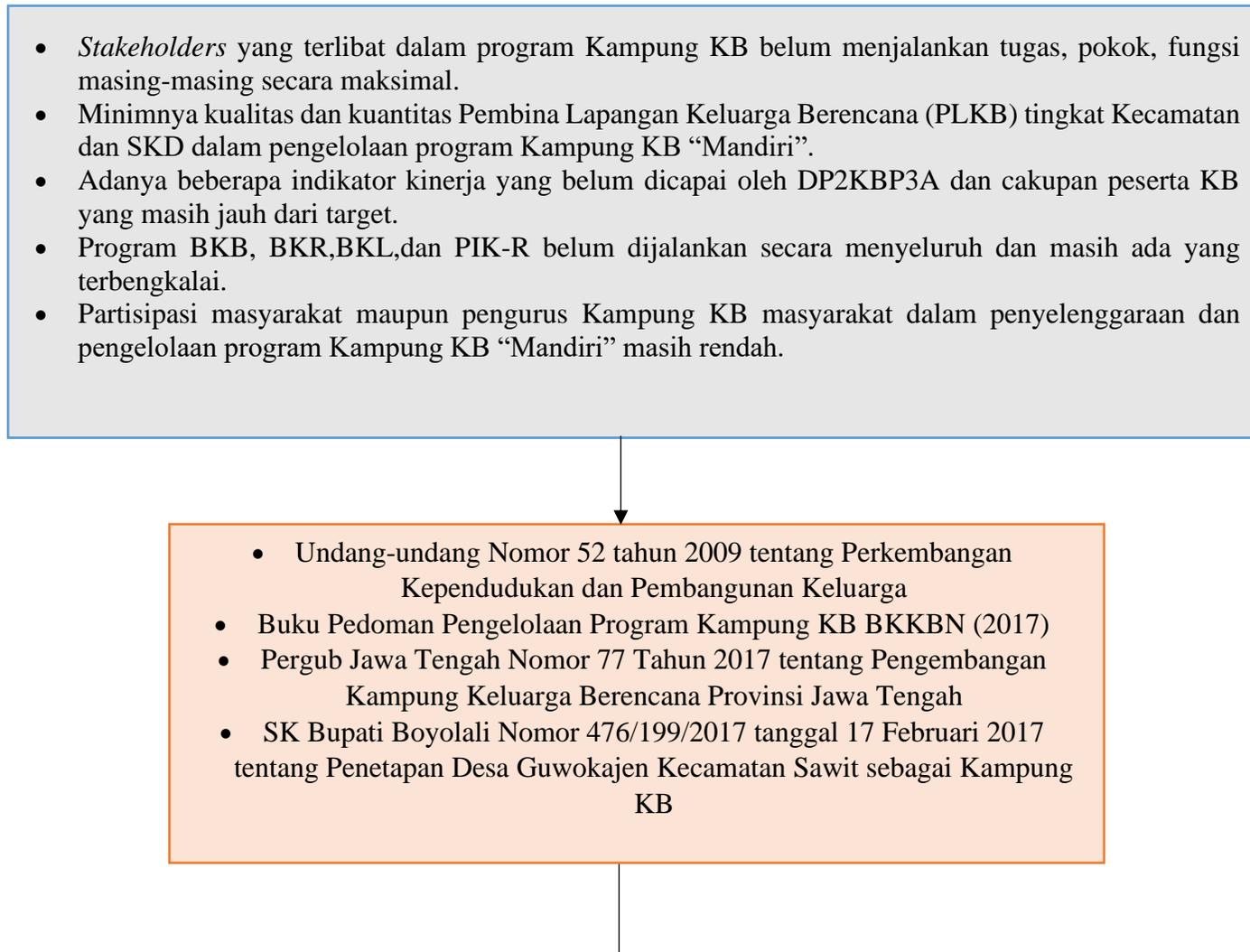
(Sunggono,1994:149-153)

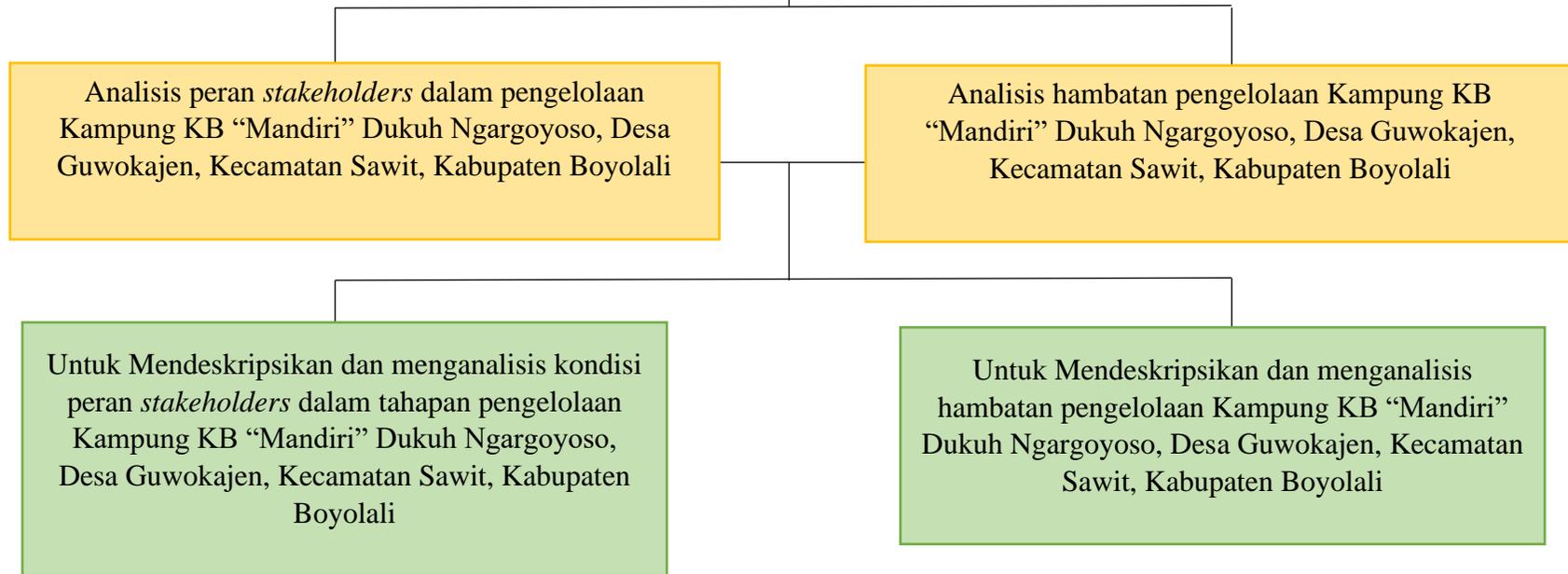
Berdasarkan pendapat dari Bambang Sunggono, peneliti menyimpulkan bahwa hambatan pengelolaan suatu program terjadi karena 4 (empat) faktor yakni isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi yang masing-masing perlu dilakukan perbaikan supaya pengelolaan program dapat berjalan dengan baik.

## 1.6. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

**Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian**





Sumber : Diolah oleh Peneliti (2021)

### 1.7. Operasionalisasi Konsep

Peran *stakeholders* adalah sejumlah perilaku yang diharapkan oleh seseorang terhadap semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam setiap tahap pengelolaan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, hingga dampak dari sebuah kebijakan baik langsung maupun tak langsung.

Pengelolaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu upaya untuk manajemen keberjalanan program dari tahap awal (perencanaan), pelaksanaan, hingga tahap akhir (pertanggungjawaban) dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dari berbagai tingkatan dari *stakeholders* pusat hingga *stakeholders* tingkat lini lapangan dengan mengacu pada regulasi yang terkait.

**Tabel 5. Fenomena dan Indikasi**

<b>Tujuan</b>	<b>Identifikasi</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Indikasi yang diamati di lapangan</b>
Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso	Identifikasi <i>stakeholders</i>	<i>Stakeholder</i> Utama /Primer	<p>1. <i>Stakeholder</i> yang merasakan dampak langsung dari Program Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso</p> <p>2. <i>Stakeholder</i> yang memiliki kepentingan langsung dengan pengelolaan Kampung KB “Mandiri”</p> <p>3. <i>Stakeholder</i> yang dilibatkan secara penuh dalam tahapan-tahapan</p>

			pengelolaan Kampung KB “Mandiri”
		<i>Stakeholder</i> Kunci	<i>Stakeholder</i> yang wewenangnya legal, pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengambilan keputusan pengelolaan Program Kampung KB “Mandiri”.
		<i>Stakeholder</i> sekunder/penunjang	<i>Stakeholder</i> yang tidak punya kepentingan langsung tapi punya kepedulian tinggi terhadap perkembangan program kampung KB.
Klasifikasi <i>stakeholders</i> berdasarkan peran		<i>Policy Creator</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran mengambil keputusan dan menentukan suatu kebijakan / program
		Koordinator	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran melakukan koordinasi antara <i>stakeholder</i> satu dengan <i>stakeholder</i> lain yang terlibat dalam suatu kebijakan / program
		<i>Fasilitator</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran dalam memberikan fasilitas dan memberikan kecukupan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran
		<i>Implementer</i>	<i>Stakeholder</i> yang memiliki peran melaksanakan kebijakan / program yang termasuk kelompok sasaran di dalamnya
		Perencanaan	Kondisi peran <i>stakeholders</i> dengan melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

	Tahapan Pengelolaan Program		tahap perencanaan program pada buku panduan teknis pengelolaan kampung KB (2017)
		Pelaksanaan program/ kegiatan	Kondisi peran <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan Kampung KB Mandiri berdasarkan indikator pelaksanaan program pada buku panduan teknis pengelolaan kampung KB (2017)
		Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kondisi peran <i>stakeholders</i> pada pemantauan, evaluasi program, dan pelaporan.
Analisis hambatan dalam pengembangan peran dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri	Hambatan dalam pengelolaan Kampung KB “Mandiri	Isi Kebijakan	Sumber daya pembantu
		Informasi	Penyampaian informasi antar <i>stakeholders</i>
		Dukungan	Partisipasi dan dukungan <i>stakeholders</i>
		Pembagian Potensi	Pembagian tugas dan wewenang

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2021)

## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian terkait analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Program Kampung KB merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy. J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun penelitian deskriptif

adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi, baik fenomena alamiah ataupun rekayasa manusia.

### **1.8.2. Situs penelitian**

Menurut Moleong, lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena yang terjadi dari objek yang diteliti untuk menghasilkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian tentang analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan program kampung KB ini dilakukan di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kampung KB “Mandiri” yang berlokasi di Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit. Pemilihan lokasi tersebut dipilih secara sengaja dengan metode *purposive* dengan alasan bahwa Dukuh Ngargoyoso merupakan salah satu wilayah yang memenuhi kriteria dukuh terpencil, terbelakang yang ditandai dengan rendahnya pendidikan dan tingkat perekonomian warga, pembangunan yang belum tersentuh dan pemukiman yang padat penduduk. Selain itu, akseptor KB masih sangat sedikit sehingga lokasi tersebut ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai penyelenggara program Kampung KB pertama di Kecamatan Sawit.

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

. Teknik penentuan subyek pada penelitian ini dilakukan melalui *purposive sampling*, dengan adanya pertimbangan dalam pemilihan subjek dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Menurut Fetterman “*Key Actors can provide detailed historical data, knowledge about contemporary interpersonal relationship*

*(including conflicts), and wealth of information about the nuances of everyday life”.*

Informan kunci dapat memberikan data historis terperinci, pengetahuan tentang hubungan interpersonal kontemporer, dan informasi terkait nuansa kehidupan sehari-hari. Adapun informan kunci dalam penelitian ini diantaranya :

- a. DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kabupaten Boyolali Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan (*Stakeholder Primer*);
- b. Kepala Desa Guwokajen (*Stakeholder Primer dan Kunci*);
- c. Ketua dan Wakil Ketua PLKB (Petugas Lapangan Kampung Keluarga Berencana) Kecamatan Sawit (*Stakeholder Primer*);
- d. PPKBD/ Sub PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) (*Stakeholder Sekunder*);
- e. Masyarakat Kampung KB “Mandiri” (*Stakeholder Primer*)

#### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang menjadi bahan penelitian. Data utama ini berkaitan dengan peran *stakeholder* dalam pengelolaan Program Kampung KB “Mandiri”, Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.

Menurut Saifuddin, Azwar (2015) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan *real* di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara mendalam dan observasi. Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Informan Penelitian**

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1.	DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kabupaten Boyolali Bidang Pengendalian Penduduk dan Peng-gerakan	Pengelola program Kampung KB tingkat Kabupaten	1 orang
2.	Kepala Desa Guwokajen	Penanggung-jawab dan pelindung dalam Program Kampung KB “Mandiri”	1 orang
3.	Ketua dan wakil ketua PLKB (Pe-nyuluh Lapangan Keluarga Beren-cana) tingkat Kecamatan Sawit	Pengelola program Kampung KB tingkat kecamatan	2 orang
4.	PPKBD/Sub PPKBD / SKD	<i>Stakeholder</i> sukarela yang aktif mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat Desa/Kelurahan dan	2 orang

		membantu kinerja PKB/-PLKB	
5.	Masyarakat Dukuh Ngargoyoso	Penerima manfaat program	2 orang

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2021.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara mengutip sumber lain, atau data-data yang tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan cara membaca, mendengarkan, dan melihat (Ibid, hlm 91). Data penunjang dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Program Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka dari berbagai sumber, berupa artikel, jurnal, skripsi, data statistik di web pemerintah, Renstra (Rencana Strategis) Pemerintah Daerah, maupun LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Boyolali.

### 1.8.5. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2010:225) sumber data dibagi dua, antara lain:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (langsung dari sumber).

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data bukan data langsung dari narasumber, seperti orang lain atau acak, catatan, dan dokumen.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam memperoleh penelitian yang akurat, valid, dan objektif. Creswell, John W, (2016) mengemukakan langkah-mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual.

Dalam menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian ini, penulis memerlukan data yang relevan terkait analisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan program Kampung KB “Mandiri” Dukuh Ngargoyoso, Desa Guwokajen, sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melibatkan metode sebagai berikut :

##### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian (Gunawan, Imam. 2013).

Dalam penelitian ini, penulis turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu terkait di lokasi penelitian. Pada pengumpulan data dalam penelitian terkait peran *stakeholder* dalam pengelolaan program Kampung KB “Mandiri” ini, peneliti merekam/ atau

mencatat dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Observasi lapangan memudahkan peneliti untuk melihat secara nyata terkait objek penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang relevan yang nantinya akan menguatkan dan mendukung hasil wawancara.

b. *Wawancara / interview*

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu isu atau permasalahan melalui proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik (Daniel,2003). Pendekatan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan terstruktur dengan menyiapkan instrument penelitian, seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis yang pilihan-pilihan jawabannya sudah disiapkan.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah segala jenis rekaman atau catatan sekunder sebagai pelengkap data primer yang tidak ditemukan di lapangan, baik yang bersifat resmi seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan program, arsip, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sujarweni,2014). Data tersebut berguna untuk menambah referensi dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi gambar pelaksanaan program, lokasi penyelenggaraan

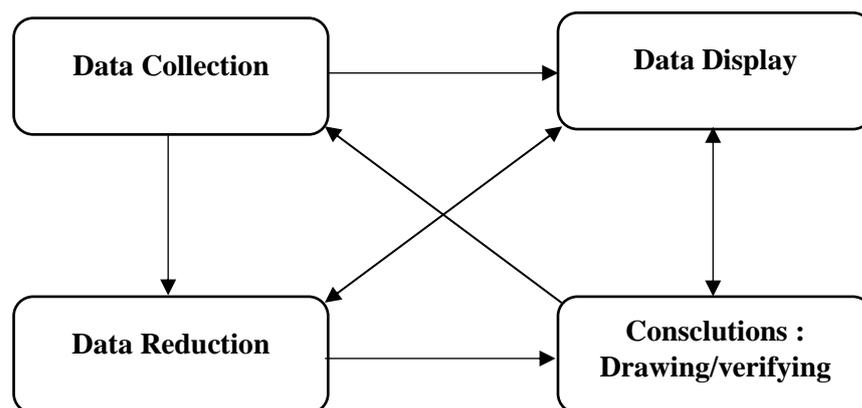
program, dan dokumen lain seperti peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran stakeholders dalam pengelolaan program Kampung KB "Mandiri."

Berdasarkan beberapa uraian teknik pengumpulan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi.

### 1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Analisis data penelitian secara kualitatif dilakukan secara terus kontinu hingga tuntas. Adapun model interaktif yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Gambar 2. Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif**



Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam tahap pengumpulan data, disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan penulis sebelumnya. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan analisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan program Kampung KB “Mandiri”.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, memfokuskan hal-hal penting yang terjadi di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus saat penelitian berlangsung (Idrus Muhammad,2009). Menurut M.B. Miles (1992:16), reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data dalam penelitian ini akan diseleksi untuk memilih informasi mana yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam tahapan penyajian data, data-data yang sudah direduksi akhirnya disajikan dalam bentuk naratif, bagan, tabel yang berguna untuk mempertajam pemahaman penelitian terkait analisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan Program Kampung KB "Mandiri".

4. Kesimpulan data dan verifikasi (*Data Conclusion*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

#### **1.8.8. Kualitas Data**

Uji kualitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability (Sugiyono,2012). Dalam penelitian ini, digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan triangulasi data. Terdapat 3 (tiga) triangulasi dalam uji kualitas data yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber dengan cara menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.